208 Peserta PPDB SMP di Kota Bogor Didiskualifikasi

BOGOR (IM)- Sebanyak 3.251 dari 8.230 peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Bogor dinyatakan lolos. Namun, terdapat 208 orang didiskualifikasi karena masalah data. "Total 8.230 yang daftar, yang diterima 3.251, yang dicoret (didiskualifikasi) 208. Ini bermasalah di sistem," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko, Kamis (13/7).

Sebagian besar peserta didiskualifikasi karena data kependudukan yang didaftarkan ke laman PPDB dan data di lapangan tidak sesuai. Hal itu tertera dalam Kartu Keluarga (KK) yang diunggah pendaftar PPDB. "Kalau tanya kenapa didiskualifikasi? Ada yang kurang, KK tidak sesuai. Kan yang upload pemohon sendiri. Sesederhana itu sebenarnya," katanya.

Menurut dia, proses penerimaan belum berakhir sampai di sini. Masih ada verifikasi lanjutan ketika peserta melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju dan apabila ditemukan kembali maka bisa digugurkan.

Meski demikian, waktu pendaftaran hingga verifikasi PPDB hanya memiliki waktu singkat sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kesalahan atau human error. "Apalagi terpecah-pecah di sekolah-sekolah. Kita bukan ahli yang tidak mungkin salah," ucapnya.

Pihaknya juga masih menerima keluhan orang tua murid yang tidak terima dengan hasil pengumuman PPDB tingkat SMP. Keluhan itu karena putra dan putrinya tidak lolos PPDB dikalahkan orang yang zonasinya lebih jauh.

"Setelah kita cek, yang dilihat kan zona mana. Kadang di zona 1 hanya 500 atau 1.000, tapi di zona 5 kan lebih jauh. Kuota zona ini kan berbeda. Salah membaca itu. Kita jelaskan saja. Kan ada passing grade, ada 7 zona. Ada yang di dalam ada yang di luar, tapi yang di luar jarang dimanfaatkan," jelas Sujatmiko.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menggelar sidak terhadap alamat peserta PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kota Bogor. Dalam hasil sidak tersebut, ditemukan banyak data yang tidak sesuai domisili atau kependudukan. Dari situ, dibentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap seluruh aduan yang masuk. Itu untuk mencegah kecurangan atau manipulasi data yang dilampirkan peserta. ● **jay**

IDN/ANTARA

AKSI DEMO GURU HONORER DI BANTEN

Sejumlah guru honorer yang sudah lulus seleksi katagori P1 (Prioritas 1) berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Provinsi Banten di Serang, Kamis (13/7). Sebanyak 2.370 orang guru honorer di Banten yang telah dinyatakan lolos seleksi katagori P1 sejak tahun 2021 hingga saat ini masih terkatung-katung dan belum mendapat penugasan serta gaji yang dijanjikan pemerintah sesuai tujuan seleksi.

AGAR BISA LEBIH BERKEMBANG DAN MAJU

Iwan Setiawan Dukung Gerakan Koperasi di Kabupaten Bogor

CIBINONG (IM)- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta seluruh jajarannya untuk mendukung gerakan koperasi di Kabupaten Bogor agar lebih berkembang dan maju.

Roda koperasi di Kabupaten Bogor agar bisa lebih berkembang dan maju itu ditegaskan Iwan Setiawan saat memperingati Hari Koperasi ke-76 di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Bogor, Cibinong.

"Semangat Hari Koperasi ke-76 ini bukan hanya sekadar seremonial belaka, tapi kita harus mewujudkan esensinya yakni mengembangkan eksistensi koperasi di Kabupaten Bogor untuk bisa lebih berkembang dan maju. Saya mengapresiasi ketua Dekopinda Kabupaten Bogor yang selalu menjalin komunikasi dengan kami, saya perintahkan jajaran perangkat daerah dan para camat untuk ditindaklanjuti," tegas Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu (12/7).

Iwan Setiawan juga meminta seluruh jajaran camat dan perangkat daerah, baik yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perkoperasian untuk mendukung setiap kegiatan koperasi di Kabupaten Bogor, agar lebih baik, lebih berkembang dan maju.

Dia menjelaskan, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang fungsi utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi pun menyelenggarakan berbagai usaha serta pelayanan sesuai kebutuhan anggota.

"Di situlah inti dari koperasi sebagai perusahaan dimana anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya," jelas Iwan.

Ia menambahkan dibutuhkan landasan hukum yang kuat untuk dasar dari upaya memajukan koperasi. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perokoperasian sebagai pengganti Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,.

"RUU perkoperasian ini dirancang untuk mendorong koperasi lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya secara global. Dengan adanya pembaharuan undang-undang perkoperasian ini kita berharap koperasi mampu menjawab tantangan zaman dan memiliki daya saing dan daya sanding yang besar," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Bogor, Pepi Januar Pelita berterima kasih kepada Pemkab Bogor karena telah berkontribusi untuk tetap mendukung dan mendorong roda gerak dan laju Dekopinda, sehingga tetap konsisten mewujudkan tri fungsi Dekopinda yaitu fasilitasi, edukasi, dan advokasi.

"Saya berharap agar seluruh perangkat daerah dan para camat juga memberikan perhatian terhadap gerakan masyarakat sadar berkoperasi. Dekopinda sebagai wadah aspirasi akan dengan senang hati terlibat dalam gerakan tersebut," kata Pepi. ● **gio**

IDN/ANTARA

PROYEK REVITALISASI ALUN-ALUN CIMAHI

Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (13/7). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan alokasi dana sebanyak Rp400 miliar sebagai bantuan di berbagai bidang program bagi Pemerintah Kota Cimahi yang salah satu alokasinya digunakan untuk percepatan revitalisasi Alun-Alun Cimahi yang ditargetkan bisa selesai akhir tahun 2023 sebagai ruang publik bagi masyarakat Cimahi.

DPRD Jabar Dorong Pemkot Bogor Membangun Sekolah Negeri Baru

Dengan dibangunnya sekolah negeri baru, maka daerah yang tidak tergapai oleh sistem zonasi bisa mendapat akses pendidikan yang sama dengan daerah lain. Sehingga pemerataan bisa terjadi, kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya.

BOGOR (IM)- Menyoroti minimnya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun sekolah negeri baru, agar pemerataan pendidikan bisa terjadi.

Hal itu bisa dakukan dengan penggunakan aset Pemkot Bogor, untuk dihibahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat agar bisa dibangunkan sekolah negeri.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan dari laporan yang diterimanya dari Disdik Kota Bogor, jumlah SMP negeri di Kota Bogor baru ada 20 unit. Sedangkan SMA negeri baru ada 10 unit.

Dengan dibangun sekolah negeri baru, menurut Abdul, maka daerah yang tidak tergapai oleh sistem zonasi bisa mendapat akses pendidikan yang sama dengan daerah lain. "Perlu ada penggunaan aset kota yang bisa dihibahkan atau disertifikasikan agar bisa dibangunkan sekolah negeri untuk warga Kota Bogor di Bogor yang blank zonasi. Sehingga pemerataan ini bisa terjadi," kata Abdul.

Abdul menegaskan, wacana pembangunan sekolah negeri baru ini perlu ada akselerasi. Bukan reguler seperti yang selama ini terjadi baik di Jawa Barat maupun di Kota Bogor.

Ia pun mempertanyakan mengapa tidak ada penambahan sekolah negeri selama bertahun-tahun. Padahal, jumlah penduduk dan daerah baru juga bertambah.

Terlebih, kata Abdul, jangkauan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semakin lama semakin kecil. "Maka harus ada penambahan. Karena dari masalah ketersediaan dan distribusi bangku inilah masalah PPDB diskusinya panjang," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan sejak tahun lalu Pemkot Bogor sudah melakukan kajian penambahan sekolah. Anggaran untuk merger sekolah sudah disiapkan, dan rencananya akan dilaksanakan tahun depan.

Sedangkan, kata Dedie, usulan anggaran untuk pembangunan SMA sudah disetujui. "Untuk tahun depan rencananya SMP nambah tiga sekolah, kalau SMA nambah satu sekolah," ucapnya, Senin (10/7).

Dedie mengatakan, ada beberapa SD yang sudah kekurangan murid akan diubah menjadi SMP. Sehingga ada beberapa SD yang berdekatan akan dimerger menjadi satu SD.

Sementara itu, lanjut Dedie, Pemkot Bogor sudah mendorong membangunan SMAN 11 Bogor di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selaran. Serta pembangunan SMAN 12 Bogor di Kekurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal. ● **gio**

BELAJAR KEUNGGULAN INOVASI PEMKAB BOGOR

Sekda Burhanudin Terima PKA dan PKP dari Berbagai Wilayah

CIBINONG (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menerima peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari berbagai wilayah di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan studi lapangan di Kabupaten Bogor, salah satunya mempelajari berbagai inovasi Pemkab Bogor.

Peserta PKA dan PKP angkatan tiga, diterima di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (13/7). Hadir Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung. Sementara hadir mendampingi Sekda Kabupaten Bogor, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor dan jajaran Pemkab Bogor lainnya.

Peserta yang melaksanakan studi lapangan di Kabupaten Bogor ini seluruhnya berjumlah 80 orang terdiri dari peserta PKA sebanyak 40 orang dan PKP sebanyak 40 orang, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia di antaranya, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dan berbagai daerah lainnya.

Mewakili Plt. Bupati Bogor, Sekda Burhanudin menjelaskan, luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Agar birokrasi dapat semakin efektif dan layanan publik lebih cepat, lebih baik, lebih murah, berkualitas, transparan. "Alhamdulillah, melalui berbagai inovasi yang kami ciptakan, tahun 2022 Pemkab Bogor meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif nomor 2 se-Indonesia dalam penghargaan Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri," jelas Burhanudin.

Burhanudin menambahkan, selain berinovasi dalam pelayanan publik, Pemkab Bogor juga terus berupaya mendorong kinerja organisasi dengan memperkuat kelembagaan. Pemerintah kabupaten terdiri dari 32 dinas dan badan, 40 kecamatan dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah.

"Terkait sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, kami sedang menyusun Peraturan Bupati tentang sistem kerja baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) nomor 7 tahun 2022 yang mengganti pola kerja dari sebelumnya bersifat hierarki menjadi team of team agar lebih fleksibel dan kolaboratif," ungkap Sekda Burhanudin.

Selanjutnya Ia berharap semoga studi lapangan di Kabupaten Bogor ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sementara Kepala PPSDM Regional Bandung, Belly Isnaeni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Plt. Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor dan jajarannya yang telah bersedia memfasilitasi dan menerima menjadi lokus studi lapangan peserta PKP dan PKA angkatan tiga tahun 2023.

Kegiatan akan berlangsung dari 12 sampai 15 Juli, dan kami memilih Kabupaten Bogor karena kami melihat banyak hal yang bisa kami pelajari khususnya bagi peserta PKA dan PKP," terang Belly.

Belly mengatakan, studi lapangan ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta untuk mempelajari inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Bogor untuk diadopsi, mengadaptasi keunggulan maupun strategi manajemen kinerja. Untuk membuat aksi perubahan yang diharapkan bisa diimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing, katanya. ● **gio**

IST

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menerima peserta PKA dan PKP berbagai wilayah di Indonesia untuk belajar keunggulan inovasi Pemkab Bogor.

Implementasi Program PHBS di TP-PKK Desa Ciherang Pondok

IST

Tim Recheking Lomba PHBS Dari Provinsi Jabar, melihat langsung implementasi Program PHBS di TP-PKK Desa Ciherang Pondok.

CIBINONG (IM)- Tim Penilai Lomba PHBS dari Pokja 4 TP- PKK Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian langsung ke lapangan untuk mengecek implementasi PHBS TP-PKK Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang lolos dalam tiga besar dalam Lomba Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mewakili Kabupaten Bogor di tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Tim Penilai Lomba PHBS dari Pokja 4 PKKn Provinsi Jawa Barat sebelumnya diterima langsung oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah, Kepala DP3AP2KB, Nurhayati dan jajaran Pemkab Bogor di Ruang Kerja Bupati Bogor, Rabu (12/7).

Selanjutnya Tim Penilaian Lomba PHBS dari Pokja 4 PKK turun langsung ke Desa Ciherang Pondok untuk rechecking Implementasi Program PHBS di TP-PKK Desa Ciherang Pondok.

Mewakili Ketua Rechecking TP-PKK Provinsi Jawa Barat, Ketua Pokja 4 TP-PKK Prov Jabar, Eti Yulianti menyatakan, bangga dan mengapresiasi peran aktif yang dilakukan TP-PKK Kabupaten Bogor dan TP-PKK Desa Ciherang Pondok dalam melaksanakan 10 program pokok PKK khususnya kegiatan gagah bencana dan PHBS.

"Penghargaan dari kami kepada para kader PKK yang berhasil lolos dan telah bersemangat dan tanpa pamrih mendarmabhaktikan dirinya dalam melaksanakan program PKK demi mencapai kesejahteraan keluarga serta masyarakat yang semakin baik," ungkap Eti.

Eti juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh TP-PKK Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang senantiasa menjadi garda terdepan mulai dari desa, kelurahan, RW dan RT dalam melaksanakan semua kegiatan 10 program pokok PKK salah satunya gagah bencana dan PHBS.

"Alhamdulillah dari hasil rechecking kami telah mencermati dan mendapatkan cikal bakal calon desa/kelurahan terbaik di kabupaten/kota yang akan mewakili sebagai terbaik ke satu, dua dan tiga dalam lomba PHBS Tingkat Jawa Barat tahun 2023 ini," terangnya.

Selanjutnya, Ketua TP-PKK Ciherang Pondok, Novie Variana Wiharsa menuturkan, bahwa Desa Ciherang Pondok memiliki inovasi-inovasi seperti Belatung Membawa Untung (BMU) yang artinya sampah diinovasikan dapat membawa untung dan berharap atas kegiatan PHBS ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga kegiatan program PHBS yang dilaksanakan membuahkan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yang lebih baik, sehingga keinginan kita untuk menciptakan warga yang sehat dan sejahtera akan segera terwujud," beber Novie Variana Wiharsa.

Kemudian, Kepala Desa Ciherang Pondok, Endi Rismawan mengharapkan Desa Ciherang Pondok dapat menjadi juara terbaik dan menjadi desa yang sehat serta juara sama seperti visi Kabupaten Bogor.

"Terimakasih kepada tim penilai semoga yang menjadi harapan dan cita-cita kami menjadi juara dan terbaik bisa terwujud," tukasnya. ● **gio**